

EVALUASI PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI (BAPERLAHU): STUDI PADA KABUPATEN MESUJI TAHUN 2019

Maharani Karin K¹ Eko Budi Sulistio ²Ita Prihantika³

^{1,2,3}Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung
karinmaharani98@gmail.com

Abstrak

Program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU) merupakan fasilitas pemerintah untuk membantu pelaksanaan pembangunan rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman secara swadaya. Pelaksanaan Program bantuan pembangunan rumah layak huni membutuhkan keterlibatan masyarakat untuk mencapai tujuan utamanya yaitu untuk menyediakan rumah yang layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), jompo ataupun disabilitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana hasil dari pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU) di Kabupaten Mesuji Tahun 2019 dan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan program. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif, jenis data yang digunakan adalah data primer dan skunder yang mana pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa evaluasi program Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU) di Kabupaten Mesuji tahun 2019 sudah berjalan dengan cukup baik. Pada tahun 2019 program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU) berhasil menuntaskan sebanyak 322 rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Mesuji. Namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program seperti suasana politik, keterbatasan dana yang dialokasikan, minimnya Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM), serta kurangnya pengawasan oleh pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mesuji.

Kata kunci: Evaluasi, Program, BAPERLAHU, MBR.

Abstract

The Livable of Housing Development Assistance Program (BAPERLAHU) is a government facility to independently support the implementation of proper housing construction in a healthy and safe environment. The implementation of the housing development assistance program requires community involvement to achieve its main goal, namely to provide habitable housing for low-income people (MBR), the elderly or with disabilities. The purpose of this research is to evaluate how the results of the implementation of the Assistance for the Construction of Livable Houses (BAPERLAHU) program in Mesuji Regency in 2019 and to find out what factors affect the implementation of the program. The research method uses qualitative research, the types of data used are primary and secondary data where data collection uses documentation, observation and interview techniques. The results of the study show that the evaluation of the Livable Housing Development Assistance program (BAPERLAHU) in Mesuji Regency in 2019 has been going quite well. In 2019 the Livable Housing Development Assistance (BAPERLAHU) program succeeded in completing 322 unfit for habitation houses (RTLH) in Mesuji Regency. However, there are several factors that affect the implementation of the program, such as the political atmosphere, limited funds allocated, the lack of Community Assistants (TPM), and lack of supervision by the Housing and Settlement Area Office of Mesuji Regency.

Keywords: Evaluation, Program, BAPERLAHU, MBR.

I. PENDAHULUAN

Perumahan dan permukiman merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan yang merupakan suatu tempat yang digunakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia karena didalamnya mengandung aspek pembelajaran nilai-nilai peningkatan

mutu kehidupan manusia. Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni diharapkan tercapai ketahanan didalam suatu keluarga.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Pemda), dijelaskan dan diamanatkan bahwa

perumahan merupakan salah satu bidang yang menjadi urusan wajib Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Kota/Kabupaten. Oleh sebab itu, perumahan dan permukiman masyarakat juga menjadi objek penting yang turut serta dikembangkan kebijakannya oleh pemerintah di Indonesia untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang ada di daerah. Untuk mendukung program penyediaan perumahan bagi masyarakat yang membutuhkan (masyarakat kurang mampu), pemerintahan pusat telah mengatur terkait pelaksanaan penyediaan perumahan layak huni yang tertuang didalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan. Regulasi ini memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki dan membantu masyarakat di daerah setempat untuk memberikan bantuan bangunan perumahan.

Kabupaten Mesuji merupakan salah satu daerah yang saat ini menjalankan program bantuan pembangunan rumah layak huni. Masyarakat setempat yang sebagian besar mata pencaharian sebagai petani, industri rumahan, ataupun nelayan bagi masyarakat yang tinggal di daerah perairan belum menunjukkan eksistensinya dalam memajukan pembangunan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan rekap hasil verifikasi Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU), tercatat terdapat sebanyak 15.678 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Mesuji yang merupakan target sasaran penerima Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU) yang berasal dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), jompo, ataupun penyandang disabilitas yang memiliki rumah tidak layak huni di atas tanah yang dimilikinya sendiri ataupun tanah hibah.

Berdasarkan observasi, peneliti menemukan ada beberapa penyimpangan dalam pelaksanaan program pembangunan rumah layak huni yang ada di Kabupaten Mesuji, antara lain adanya ketidaksesuaian kualifikasi pada beberapa penerima Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU), sehingga masih banyak masyarakat yang harusnya menerima bantuan justru harus terlewat. Selain itu,

pengawasan oleh pihak Dinas dianggap kurang sehingga terjadi sejumlah permasalahan dalam program pembangunan, seperti tidak selesainya ratusan rumah program pembangunan tahun anggaran 2016/2017 dan 2018. Padahal, pengawasan dan pengendalian sangat penting untuk masukan dan perbaikan dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU).

Tidak hanya di Kabupaten Mesuji, namun fenomena ini juga kerap terjadi di beberapa daerah yang menjalankan program pembangunan rumah layak huni. Pada Kabupaten Kepulauan Anambas, permasalahan serupa dalam pembangunan rumah layak huni terjadi karena kurang selektifnya Dinas dalam memverifikasi dan menetapkan penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sehingga ada penerima dengan pendapatan yang tetap dan berpenghasilan tinggi mendapatkan bantuan pembangunan RTLH (Khoris, 2013:10). Permasalahan lain yang juga timbul dalam pelaksanaan pembangunan rumah layak huni adalah proses pembangunan yang melebihi batas waktu yang ditentukan dan bahan bangunan yang datang berkualitas kurang baik (Widayanti, 2019:12).

Fungsi pengawasan dan pengendalian dilakukan agar dana anggaran dan pelaksanaan pembangunan/peningkatan rumah yang dibangun secara swadaya oleh secara tepat sasaran, tepat penggunaan, dan akuntabel (Ratih, 2018:68). Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Evaluasi Program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU) Studi Pada Kabupaten Mesuji Tahun 2019"

II. TINJAUAN LITERATUR

Status Sosial Ekonomi

Status sosial ekonomi merupakan tingkatan tinggi rendahnya prestise yang dimiliki seseorang dalam kedudukannya di masyarakat berdasarkan pada kepemilikan materi ataupun sesuatu lainnya yang dapat menunjukkan status sosial yang dimiliki orang tersebut. Menurut Soekanto (2001) menyatakan bahwa komponen pokok

kedudukan sosial ekonomi meliputi ukuran kekayaan, ukuran kekuasaan, ukuran kehormatan, dan ukuran ilmu pengetahuan. status sosial jg dapat dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu : pekerjaan, pendidikan, pendapatan, jumlah tanggungan orang tua, kepemilikan dan jenis tempat tinggal. Menurut Sunarto (2004), terdapat tiga tingkatan status sosial ekonomi di masyarakat, yaitu kelas atas (*upper class*), kelas menengah (*middle class*), dan kelas bawah (*under class*).

Perumahan dan Permukiman

Perumahan yakni suatu bangunan, tempat tinggal manusia dalam melangsungkan kehidupannya, sebagai wadah kehidupan manusia yang menyangkut aspek sosial, ekonomi, dan budaya dari penghuninya. Sedangkan permukiman adalah lingkungan hidup yang berupa kawasan perdesaan ataupun perkotaan yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan lingkungan tempat tinggal masyarakat dalam kehidupannya.

Kebijakan Publik

Friedrick dalam Santosa (2008), kebijakan publik ialah seperangkat tindakan yang dilakukan pemerintah dengan suatu tujuan dan diarahkan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun proses kebijakan publik dimulai dari Penyusunan agenda (*Agenda Setting*) Formulasi kebijakan (*Policy Formulating*, Adopsi kebijakan (*Policy Adoption*), Implementasi kebijakan (*Policy Implementation*), dan Evaluasi kebijakan (*Policy Evaluation*)

Program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni oleh Pemerintah

Berdasarkan pedoman BPS, serta Peraturan Bupati Mesuji Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perumahan Layak Huni di Kabupaten Mesuji, BAPERLAHU dimaksudkan untuk mendorong dan meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman yang layak dan sehat di daerah wilayah Pemerintah Kabupaten Mesuji. Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni

(BAPERLAHU) dipandang perlu diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki kriteria sesuai dengan ketentuan dan persyaratan pemberian pembangunan perumahan layak huni di Kabupaten Mesuji. Dana yang dikeluarkan untuk program Bantuan Pembangunan Perumahan Layak Huni adalah bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten Mesuji, dan besaran nilai bantuan ditetapkan dengan keputusan Bupati Mesuji untuk melaksanakan program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU) di Kabupaten Mesuji yang akuntabel, tepat sasaran, dan tepat waktu sesuai prosedur atau mekanisme. Adapun tujuan dari adanya Program ini yaitu (1) meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik, (2) memberikan tempat tinggal yang layak dan (3) memberikan kehidupan yang layak, hidup bersih dan sehat.

Evaluasi Kebijakan Publik

Secara umum, evaluasi sebagai suatu tindakan atau proses setidaknya memiliki tiga macam fungsi pokok, yaitu (1) Mengukur kemajuan, (2) Menunjang penyusunan rencana, (3) Memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali. Sedangkan menurut Akdon (2007:176) tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi dan masukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Keuntungan dari evaluasi bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, strategi, kebijakan; untuk pengambilan keputusan; untuk tujuan pengendalian program/kegiatan; untuk perbaikan input, proses, dan output, perbaikan tatanan atau sistem prosedur. Pada penelitian ini, untuk menilai tingkat keberhasilan dari program BAPERLAHU, peneliti menggunakan skema umum penilaian evaluasi menurut Nurcholis (2007) yang terdiri dari *input*, *process*, *output* dan *outcome*.

a. *Input*

Input adalah masukan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan dengan meninjau sumber daya sehingga dapat menganalisis apakah alokasi sumberdaya yang ada

- sudah sesuai dengan rencana strategik yang ditetapkan
- b. *Proses*
Process adalah bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk itu dikembangkan instrument yang meliputi indikatornya, yakni ketepatan sasaran, ketepatangunaan, dan efisiensi. *Process* menekankan kepada efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program BAPERLAHU
 - c. *Output*
Output adalah hasil dari pelaksanaan kebijakan dengan membandingkan keluaran dapat dianalisis apakah kegiatan yang terlaksana sudahkah sesuai dengan rencana. Indikator keluaran menjadi landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolak ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur.
 - d. *Outcome*
Outcome yaitu berkenaan dengan apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran dengan tujuan kebijakan. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil yang lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, instansi dapat mengetahui apakah hasil yang diperoleh memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan & Taylor dalam Moleong (2012) mendefinisikan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Moleong (2012) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang sesuatu yang

dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah menggambarkan suatu fenomena yang terjadi sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Dimana data tersebut didapatkan melalui hasil pengamatan misalnya dari perilaku, persepsi, tindakan, atau wawancara langsung dengan seseorang yang menjadi sumber informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti. Kemudian data yang diperoleh tersebut dideskripsikan kedalam bentuk kata-kata atau bahasa sehingga menghasilkan sebuah tulisan. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif ini dikarenakan sesuai dengan tujuan penelitian yakni ingin menggambarkan hasil evaluasi program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU) di Kabupaten Mesuji tahun 2019 apakah sudah tepat sasaran dan ingin mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaannya.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU) di Kabupaten Mesuji Tahun 2019

a. *Input*

Didalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU), *input* pelaksanaan kebijakan terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdiri dari Dinas perumahan dan kawasan permukiman, Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM), masyarakat penerima bantuan serta pengelolaan dana/anggaran. Adapun fungsi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pelaksanaan program BAPERLAHU yaitu merumuskan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan, membuat peraturan-peraturan ataupun meninjau perkembangan program. Selain itu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

memiliki fungsi penyelenggaraan urusan program berupa pelayanan administratif bagi calon penerima bantuan program BAPERLAHU. Adapun dalam hal ini pelaksanaan program kerja di lapangan, Dinas akan dibantu oleh tim khusus yaitu Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM), yakni merupakan tenaga pembantu dalam kegiatan penyaluran program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU).

Adapun tugas dan tanggung jawab Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) yakni membantu Dinas melakukan verifikasi lapangan, memfasilitasi pelaksanaan rencana pembangunan atau rencana penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan pembangunan BAPERLAHU dan melaporkan hasil pelaksanaan di lapangan kepada Dinas. Namun, pada tiap Kecamatan, Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) hanya terdiri dari 2 orang. Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) yang hanya disediakan dua orang saja dalam tiap Kecamatan tentulah menjadi suatu tanggung jawab yang berat bagi Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) itu sendiri. Selain itu, dalam pelaksanaan program ini, tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) harus turun langsung untuk melihat kondisi dan situasi di lapangan, mulai dari pendataan rumah tidak layak huni, sebagai pendamping calon penerima bantuan BAPERLAHU, sebagai pengawas pelaksanaan renovasi rumah penerima bantuan, dan juga pada tahap akhir yakni memberikan laporan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mesuji terhadap pelaksanaan renovasi rumah penerima bantuan.

Apabila tenaga pendamping tidak transparan dan tidak disiplin, maka pihak dinas akan kesulitan dan salah ketika melihat potret sesungguhnya di lapangan, seperti saat adanya suasana politik yang seringkali dijadikan unsur kampanye untuk mendapatkan simpati dari masyarakat. Hal ini turut menjadi kendala pelaksanaan program, yang mana terkadang terjadi manipulasi data penerima bantuan.

Selain itu, tugas lain Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) harus meninjau dan mengawasi kinerja Kelompok Penerima Bantuan (KPB), karena dalam teknisnya penerima bantuan bertugas sebagai

swakelola yang mana pengelolaannya ada ditangan masyarakat itu sendiri. Adapun penerima bantuan membentuk kelompok yang didalamnya terdiri dari 10 s/d 25 orang, yang selanjutnya disebut sebagai Kelompok Penerima Bantuan atau KPB. Menurut Kabid Perumahan dan Bangunan Gedung, Andre Al Rendra, selain sebagai swakelola, masyarakat penerima bantuan juga bertindak sebagai swadaya yang pelaksanaannya bisa berbentuk tenaga, berbentuk uang, ataupun berbentuk tabungan material seperti pasir, batako, dll. Waktu yang diberikan untuk menyelesaikan pembangunan yaitu 6 bulan. Dengan adanya jangka waktu ini, menimbulkan permasalahan tersendiri bagi KPB karena harus membangun bergilir dari orang sehingga memakan waktu lama. Oleh sebab itu, untuk menyelesaikan rumahnya KPB harus membayar upah tukang. Kondisi inilah yang menyulitkan pihak Dinas dan Tenaga Pendamping dan mengharuskan intensif lagi dalam pengawasan dan pendampingan agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan tugas yang begitu banyak, dan sumberdaya yang begitu terbatas menyebabkan kurangnya Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) di lokasi pelaksanaan pembangunan.

b. Proses

Rancangan Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU) yang dikonsepkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mesuji adalah rumah layak huni yakni tempat tinggal yang memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. Rumah layak huni juga harus memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Gambaran konsep Rumah Layak Huni oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilihat dalam gambar berikut :

Gambar 1. Rancangan BAPERLAHU



(Sumber : Dokumentasi peneliti, 2020)

Target Penerima manfaat pelaksanaan program BAPERLAHU adalah keluarga miskin yang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, yakni Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang diintervensi agar dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak, terutama dalam pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni. Dalam memberi bantuan program BAPERLAHU diprioritaskan kepada keluarga yang memiliki taraf hidup/penghasilan rendah, jompo ataupun disabilitas, terutama yang berusia lanjut. Adapun dalam impelementasinya, program BAPERLAHU memiliki 3 (tiga) tahap pelaksanaan.

Untuk tahap I material yang diturunkan ialah sebesar 40% dari total pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dilakukan secara swadaya atau bergotong royong sesama masyarakat dan Kelompok Penerima Bantuan (KPB).

Gambar 2. Pembangunan Pondasi



(Sumber : Dokumentasi peneliti, 2020)

Selanjutnya, penurunan material untuk tahap II ini adalah sebanyak 30% yang digunakan untuk pembangunan struktur dan dinding bangunan. Presentase kenaikan kinerja untuk tahap II ini adalah 70% dari pembangunan. Apabila KPB menyatakan

sudah menyelesaikan tahap II maka dapat melanjutkan pembangunan untuk tahap selanjutnya.

Gambar 3 .Pembangunan dinding



(Sumber : Dokumentasi peneliti, 2020)

Selanjutnya untuk tahap III dalam pembangunan BAPERLAHU yang merupakan tahap akhir dalam proses pelaksanaan pembangunan, material yang diturunkan yakni sebanyak 30% yang dipergunakan untuk finishing pembangunan, sehingga total bantuan menjadi 100%. Adapun pelaksanaannya yakni menyelesaikan konstruksi atap, dan penyelesaian instalasi mekanikal maupun elektrik (saluran air, MCK, listrik, dll). Adapun contoh dari penyelesaian tahap III adalah sebagai berikut

Gambar 4. Penyelesaian Pembangunan



(Sumber : Dokumentasi peneliti, 2020)

Pengerjaan rumah dibatasi dalam waktu 6 bulan dari semenjak diterimanya bantuan oleh masyarakat. Akan tetapi dilapangan didapatkan temuan bahwa ada beberapa rumah yang pengerjaannya melebihi batas waktu yang telah diteapkan. Menurut peneliti, banyak faktor yang menjadi alasan mengapa pengerjaan renovasi rumah melebihi batas waktu, diantaranya kurangnya sosialisasi dan interaksi masyarakat tersebut dilingkungan

tempat tinggalnya, ataupun kurangnya material bangunan yang dibutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman maupun Tim Pendamping Masyarakat (TPM) setempat. Menurut peneliti seharusnya dalam pengerjaan program ini pihak Dinas, desa, dan TPM setempat harus lebih sering untuk memantau ke lokasi agar lebih tahu kondisi dilapangan bagaimana dan seperti apa pengerjaannya.

c. Output

Output merupakan hasil langsung (jangka pendek) *Output* merupakan hasil langsung yang didapatkan dari sebuah proses pelaksanaan program. Adapun rumah hasil program BAPERLAHU dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 5. BAPERLAHU Kec. Mesuji



**Gambar 5. BAPERLAHU
Kec. Simpang pematang**



(Sumber : Dokumentasi peneliti, 2020)

Pada tahun 2019, sebanyak 1.338 KK gagal mendapatkan bantuan sedangkan data realisasi hanya terdapat 322 KK yang mendapat bantuan. Data ini cenderung sangat turun dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada separunya dari rumah

yang diajukan. Namun, dalam realisasi pelaksanaan rumah yang terdata sebagai penerima bantuan terkhusus tahun 2019, sudah menunjukkan pelaksanaan dengan cukup baik.

d. Outcome (dampak)

Program BAPERLAHU memiliki dampak tersendiri, baik bagi masyarakat penerima bantuan ataupun bagi Pemerintah Kabupaten Mesuji. Adapun *outcome* dari pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU) dapat dilihat dari beberapa bidang, seperti sosial ekonomi, pendidikan, dan juga kesehatan.

Program ini memberikan manfaat terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni dan sehat bagi keluarga miskin dan meningkatkan kebudayaan lingkungan yang bersih dan sehat dilingkungan masyarakat. Selain itu, manfaat langsung dapat dirasakan karena masyarakat nanti akan menempati rumah yang telah di rehab. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, masyarakat yang menerima bantuan juga sangat merasa terbantu dengan adanya program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni ini, karena rumah yang mereka tinggal lebih baik kondisinya daripada sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan ketahanan rumah serta sarana dan prasarana bangunan yang lebih kokoh dari sebelumnya. Sebagian besar masyarakat yang memiliki hunian kumuh dan cenderung tidak layak, seringkali memiliki rasa tidak percaya diri di lingkungan sosial bahkan pada bidang ekonomi karena cenderung lebih tertutup didalam kehidupan bermasyarakat.

Masyarakat yang menerima bantuan sangat merasa terbantu dengan adanya program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni ini, karena rumah yang mereka tinggal lebih baik kondisinya daripada sebelumnya. Kondisi fisik rumah setelah direhabilitasi menjadi lebih baik, kuat, dan tidak mengkhawatirkan akan membahayakan penghuninya serta dilengkapi dengan fasilitas seperti MCK, air, dan listrik.

Lalu kemudian dampak program dilihat dari bidang kesehatan. Kesehatan merupakan faktor penting didalam kehidupan bermasyarakat. Keadaan lingkungan dan

hunian yang tidak layak dapat menimbulkan berbagai masalah penyakit bagi penghuni disekitarnya. Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU) oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji diharapkan agar benar-benar layak untuk kesehatan masyarakat, mengurangi angka presentase gangguan kesehatan dan meningkatkan ketahanan masyarakat. Selain itu dengan adanya rumah yang layak dan kokoh, tentunya para penghuni didalamnya tidak perlu merasa risau akan terjadinya sesuatu akibat dari kurangnya ketahanan bangunan yang ditinggali. Lingkungan yang kurang layak seringkali menyebabkan permasalahan bagi anak-anak baik dari segi psikis ataupun fisik karena terganggunya kenyamanan belajar. Berdasarkan hasil di atas, maka dapat disimpulkan bahwa program ini memberikan manfaat terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni dan sehat bagi keluarga miskin dan meningkatkan kebudayaan lingkungan yang bersih dan sehat dilingkungan masyarakat. Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU).

Kelompok sasaran penerima program bantuan

a. Kelompok sasaran yang tercover

Kelompok sasaran penerima program pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU) berkaitan dengan seberapa banyak jumlah masyarakat yang menerima bantuan pada program kebijakan ini. Berdasarkan hasil penelitian. Pada tahun 2019 program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU) di Kabupaten Mesuji, sebanyak 322 KK mendapat bantuan realisasi pembangunan. Walaupun data ini cenderung sangat turun dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, jika dilihat dari sistem pelaksanaan realisasi penerima bantuan, BAPERLAHU sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil di atas, maka dapat disimpulkan bahwasannya Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU) di Kabupaten Mesuji masih belum dirasakan kebanyakan warga miskin yang turut mengajukan program perbaikan BAPERLAHU. Hanya segelintir masyarakat

yang terpilih yang merasakan manfaat dari pemberian bantuan. Hal ini dapat dilihat bahwasannya pada tiap kecamatan, tidak semua desa mendapatkan bantuan. Seharusnya tiap-tiap desa di satu kecamatan diadakan pemerataan dalam pembangunan sehingga program pembangunan dapat merata disetiap desanya.

b. Kesesuaian kelompok penerima bantuan

Kesesuaian kelompok penerima bantuan berkenaan dengan ketepatan sasaran penerima bantuan dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU) apakah sudah sesuai dengan kriteria penerima sesuai dengan rancangan awal program. Adapun kriteria penerima BAPERLAHU adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah berkeluarga dan tinggal di wilayah Kabupaten Mesuji minimal 5 tahun, memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah, belum memiliki rumah atau memiliki rumah yang tidak layak huni, belum pernah memperoleh dana bantuan pembangunan atau bantuan pemerintah untuk program perumahan lainnya, penghasilan kurang atau sama dengan upah minimal provinsi dan bersedia berswadaya membentuk kelompok dengan pernyataan tanggung renteng.

Secara teknis, dalam pelaksanaannya penerima bantuan harus memiliki kualifikasi yang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, Untuk mengatasi banyaknya responsivitas dan menetapkan penerima bantuan yang sesuai dengan kriteria program, pemerintah terus melakukan pemantauan. Hal ini bisa dilihat dari adanya sistem *crosscheck* dan Verifikasi ulang oleh pihak Dinas terkait agar tidak ada manipulasi data oleh warga setempat agar tidak ada manipulasi data penerima bantuan. Walaupun sebagian besar penerima bantuan sudah sesuai dengan kriteria, namun masih ditemukan adanya penyelewengan penetapan penerima bantuan karena adanya intervensi politik di daerah-daerah tertentu. Oleh karena itu, kesesuaian kelompok penerima bantuan dinilai masih kurang, karena kurang telitinya pihak

penyelenggara dalam menentukan kelompok penerima bantuan yang sesuai dengan ketentuan.

c. Kontribusi Masyarakat Penerima Bantuan

Penerima Bantuan merupakan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU), karena dalam teknisnya masyarakat penerima bantuan bertugas sebagai swakelola yang mana pengelolaannya ada ditangan masyarakat itu sendiri. Selain itu, masyarakat penerima bantuan juga bertindak sebagai swadaya yang pelaksanaannya bisa berbentuk tenaga, berbentuk uang, ataupun berbentuk tabungan material. Jadi, masyarakat penerima bantuan sangatlah berperan penting dalam kontribusi pembangunan ini.

V. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU) adalah intervensi pemerintah dalam penyediaan rumah layak huni kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang merujuk pada Bantuan Stimulan Pembangunan Swadaya yang berjalan sejak 2013 hingga saat ini yang dilakukan secara bertahap setiap tahunnya untuk mengentaskan rumah yang tidak layak yang ada di Kabupaten Mesuji.
- 2) Program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU) di Kabupaten Mesuji Tahun 2019 masih belum begitu optimal karena adanya penguluran waktu dalam pelaksanaan program di lapangan, kurangnya pengawasan dari pihak dinas, kurangnya Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM).
- 3) Pada tahun 2019 Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU) berhasil menuntaskan sebanyak 322 rumah

tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Mesuji.

- 4) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU) di Kabupaten Mesuji Tahun 2019 antara lain yakni intervensi politik/suasana politik, keterbatasan dana yang dialokasikan, tingkat disiplin dan transparansi Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM), serta pengawasan oleh pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mesuji.

Saran

Dalam rangka untuk peningkatan kualitas dan objektivitas program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU) di Kabupaten Mesuji, penulis menguraikan saran yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (BAPERLAHU) di Kabupaten Mesuji sebagai berikut :

- 1) Perlu adanya penambahan jumlah Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) yang disesuaikan dengan pedoman pelaksanaan, supaya program BAPERLAHU tercapai dengan maksimal.
- 2) Pelaksanaan Program harus sesuai dengan pedoman untuk meminimalisir kesalahan dan kekurangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan program BAPERLAHU.
- 3) Harus adanya peningkatan kualitas kerja pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mesuji untuk memaksimalkan keberhasilan program BAPERLAHU dengan manajemen sistem monitoring yang lebih baik lagi.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Akdon. (2007). *Manajemen strategic untuk manajemen pendidikan*. Alfa Beta. Bandung
- Khori. (2013). *Analisis Pelaksanaan Bantuan Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2011 di Desa Teluk Siantan Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Riau
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Nurcholis, Hanif. (2007). *Teori dan Praktik : Pemerintah dan Otonomi Daerah*. PT. Grasindo. Jakarta.
- Ratih. (2018). *Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kementerian PUPR Tahun 2017 di Provinsi Kalimantan Barat*. Cakrawala, Jakarta
- Santosa, Pandji. (2008). *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Soekanto, Soerjono. (2001). *Sosiologi: suatu pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunarto, Kamanto. (2004). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Widayanti. (2019). *Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan swadaya di Kelurahan Tamanan Kecamatan Tulung Agung Kabupaten Tulungagung*. Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur